



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 759637

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.937.000.000

1. Tanah Seluas 513 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. Tanah Seluas 56 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 97.000.000
3. Tanah Seluas 944 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 545.000.000
4. Tanah Seluas 5051 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000
5. Tanah Seluas 362 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
6. Tanah Seluas 477 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 157.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 569 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.330.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/216 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.080.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 587 m2/220 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 233.000.000
11. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, WARISAN Rp. 235.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	170.000.000
1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2010, HASIL SENDIRI	Rp.	170.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	146.350.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	5.550.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.155.505.067
F. HARTA LAINNYA	Rp.	680.000.000
Sub Total	Rp.	17.638.855.067
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.638.855.067

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.